

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Gempadewa (Gerakan Masyarakat Peduli Alam) merupakan gerakan masyarakat sipil yang muncul sebagai upaya menolak pembukaan lahan tambang di Desa Wadas. Gerakan sosial ini muncul karena adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan demi menjaga kelangsungan hidup dan masa depan mereka. Gempadewa melakukan perlawanan dalam berbagai bentuk, meliputi:

1. Wadas menggugat, merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh Gempadewa bersama LBH Yogyakarta dan LBH-AP Muhammadiyah untuk menggugat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, Presiden Republik Indonesia, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ditjen Minerba dan Menteri PUPR.
2. Aksi kolektif konfliktual, yakni aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Gempadewa berupa kontak fisik dengan aparat seperti aksi blokade yang dilakukan masyarakat dan aksi unjuk rasa di depan gedung Gubernur Jawa Tengah.
3. Aksi kolektif non-konfliktual, yakni aksi yang tidak melibatkan konflik dan berorientasi pada norma, meliputi pagelaran budaya, pameran seni, kegiatan *mujahadah*, pembuatan tugu perlawanan, dan mengadakan *aksi#menolaklupa* yang menjadi momen mengingat kembali gerakan dan peristiwa yang telah terjadi di Desa Wadas.
4. Diskusi *online* yang dilakukan oleh Gempadewa bersama jaringan dengan topik permasalahan Wadas.

Gempadewa membangun *framing* tentang persoalan Wadas memanfaatkan media sosial seperti *Instagram*, *Twitter*, dan *YouTube* dengan membuat video-video tentang kondisi Wadas guna menarik simpati khalayak umum. Gempadewa berhasil memobilisasi sumber daya dan memanfaatkannya untuk meraih tujuan gerakan, meliputi:

1. Sumber daya material, terutama yang bersumber dari swadaya masyarakat dan hasil ekonomi kreatif dari pembuatan dan penjualan *merchandise* kaos dan kopi Wadas melalui *platform* media sosial *Instagram*.
2. Sumber budaya melalui kegiatan *mujahadah* yang menjadi wadah konsolidasi utama dalam membahas gerakan perlawanan warga dalam menolak tambang dan pembuatan berbagai video yang diunggah di media sosial Gempadewa.
3. Sosial-organisasi dalam upaya membangun jejaring, melibatkan berbagai pihak seperti LBH, Walhi, para aktivis mahasiswa, dan pihak lain yang mau membantu dan bekerja sama dengan Gempadewa.
4. Sumber daya manusia. Warga desa, baik laki-laki maupun perempuan, bergotong royong terlibat dalam gerakan. Mereka didukung oleh berbagai komunitas dari luar desa.
5. Sumber daya moral. Gempadewa mendapatkan bantuan dan dukungan moral dari berbagai organisasi dan aktivis berpengaruh yang berasal dari luar wilayah.

Gempadewa melakukan berbagai mekanisme untuk mengakses sumber daya, meliputi: (1) agregasi atau pengumpulan, mengumpulkan masyarakat dalam berbagai kegiatan dalam upaya mempertahankan tanah masyarakat; (2) produksi diri, dengan cara membentuk organisasi lain sebagai wadah seluruh lapisan masyarakat, yakni Wadon Wadas dan Kamudewa (Kamula Muda Desa Wadas); (3) kooptasi atau pengambilan, dengan cara memanfaatkan sumber daya pengetahuan para pemuda Wadas di bidang teknologi serta melibatkan jaringan dalam gerakan dan aksi perlawanan; (4) perlindungan, melalui kerja sama dengan LBH untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepemilikan akun media sosial Gempadewa lebih dari satu orang untuk menghindari pencurian data. Hasil penelitian yang

dilakukan oleh peneliti menunjukan adanya penguatan terhadap teori *framing* dan mobilisasi sumber daya, yang ditujukan dengan pemanfaatan Gempadewa terhadap sumber daya yang ada untuk menggerakkan komunitas dalam melakukan gerakan sosial.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan pembahasan di atas, ada beberapa rekomendasi yang peneliti sampaikan:

1. Kepengurusan Gempadewa harus lebih terstruktur dengan pembagian kerja yang jelas dan tidak tergantung pada satu-dua orang figur saja sehingga tujuan organisasi lebih mudah tercapai.
2. Perangkat desa sebagai lembaga pemerintahan di level bawah harusnya dapat menjadi penengah dalam kasus Wadas, bukan hanya menjadi kepanjangan tangan atau penerus pemerintah pusat.
3. Pemerintah pusat dalam membuat kebijakan harus berpihak pada kelompok yang paling lemah, bukan malah memaksakan kehendak sesuai keinginan kelompok yang kuat. Dengan demikian, tujuan pembangunan demi menyejahterakan rakyat dapat tercapai.
4. Kasus Wadas masih menyisakan banyak ruang untuk penelitian-penelitian lain. Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya, khususnya yang fokus pada topik gerakan sosial.